



Sosiologi Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri: Analisis tentang Peran Sekolah sebagai Ruang Publik dalam Membentuk Warga Negara yang Demokratis dan Religius

Zidni Nafiatul Rizqi

Pendidikan Agama Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
zidninafiatul14@gmail.com

Muh. Hanif

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
muh.hanif@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara sosiologis peran Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) sebagai ruang publik dalam membentuk warga negara yang demokratis dan religius. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di MTs Negeri 1 Banyumas pada periode 2025-2026, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sekolah melalui kegiatan partisipatif seperti pemilihan ketua OSIS (Pemilos), musyawarah kelas, kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai ruang publik di mana siswa belajar mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, pemilihan ketua OSIS (Pemilos) di MTs Negeri menjadi laboratorium demokrasi yang paling efektif, di mana siswa terlibat langsung dalam seluruh proses demokrasi, mulai dari kampanye, debat publik, pemungutan suara yang rahasia dan jujur yang mengajarkan nilai-nilai partisipasi aktif, sportivitas, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kedua, nilai-nilai demokrasi diintegrasikan tidak hanya melalui pembelajaran PPKn secara formal di kelas, tetapi juga melalui berbagai momen institusional seperti musyawarah kelas, pembentukan tata tertib sekolah secara partisipatif, kegiatan Pramuka, yang mengangkat tema suara demokrasi dan kebinekaan global. Ketiga, sekolah sebagai ruang publik terbukti mampu menjembatani dikotomi antara nilai-nilai keislaman (ukhuwah Islamiyah, ta'dzim, adab dalam berpendapat) dengan nilai-nilai demokrasi universal (kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan), menghasilkan sintesis unik yang disebut warga negara religius-demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mts Negeri dapat menjadi model pendidikan kewarganegaraan yang integratif jika mampu mengembangkan ruang publik yang inklusif dan partisipatif yang menghormati identitas keagamaan sekaligus mendorong keterlibatan aktif siswa dalam kehidupan demokrasi.

Kata Kunci: *Madrasah Tsanawiyah, Ruang Publik Pemilos, Warga Negara Religius Demokratis,*

Abstract

This study examines, from a sociological perspective, the role of the State Junior High School (MTs N) as a public space in shaping democratic and religious citizens. Using a qualitative approach with a case study design at MTs Negeri 1 Banyumas during the 2025–2026 period, this study explores how the school, through participatory activities



such as the Student Council President election (Pemilos), class meetings, and extracurricular activities, functions as a public space where students learn to practice democratic values directly while simultaneously internalizing Islamic values. The research findings reveal three main points. First, the Student Council President election (Pemilos) at MTs Negeri serves as the most effective democratic laboratory, where students are directly involved in the entire democratic process—from campaigning, public debates, to secret and honest voting which teaches the values of active participation, sportsmanship, and responsibility as good citizens. Second, democratic values are integrated not only through formal Civic Education (PPKn) lessons in the classroom but also through various institutional moments such as class meetings, the participatory formulation of school regulations, and Scouting activities, which highlight themes of democratic voice and global diversity. Third, the school as a public space has proven capable of bridging the dichotomy between Islamic values (Islamic brotherhood, respect, and etiquette in expressing opinions) and universal democratic values (responsible freedom of expression, equality, and respect for differences), resulting in a unique synthesis known as the religious-democratic citizen. This study concludes that State Islamic Junior High Schools (Mts Negeri) can serve as a model for integrative civic education if they are able to develop an inclusive and participatory public space that respects religious identity while simultaneously encouraging students' active engagement in democratic life.

Kata Kunci: *Islamic Junior High School, Public Space, Student Council Election (Pemilos), Religious Democratic Citizen*

PENDAHULUAN

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran bahwa pendidikan demokrasi dan pendidikan agama tidak dapat berjalan secara terpisah di lembaga pendidikan Islam, terutama pada jenjang Madrasah Tsanawiyah yang merupakan masa transisi kritis pembentukan identitas siswa, di mana data menunjukkan bahwa praktik-praktik demokrasi di sekolah-sekolah Indonesia masih belum optimal dan seringkali bersifat prosedural semata, sementara konflik bernuansa agama dan politik identitas terus menghantui kehidupan kebangsaan. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian (Raihani, 2007), reformasi pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 telah mendorong perubahan signifikan, namun pembelajaran demokrasi di sekolah-sekolah masih menghadapi tantangan besar dalam hal implementasi yang substantif di lapangan (Septiana, 2023).

Dinamika sosiologis di wilayah Banyumas secara khusus menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai lokal dan keagamaan berperan sebagai jangkar penting dalam melawan gempuran radikalisme digital di kalangan remaja (Hanif, 2021)

Penelitian sebelumnya mengenai demokrasi di institusi pendidikan Islam masih terbatas pada aspek kurikulum atau penjelasan tentang kegiatan seremonial, sementara aspek sosiologis mengenai bagaimana sekolah berfungsi sebagai ruang publik dalam menciptakan warga negara yang baik dan beragama secara bersamaan jarang diteliti secara mendalam. Sebagai contoh, studi oleh (Musthofiyah, 2012) telah mengungkapkan bagaimana nilai-nilai demokrasi diintroduksi di SMP Islam Sudirman Tenganan melalui kegiatan OSIS dan Pramuka, namun penelitian tersebut belum menganalisis secara rinci bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berpartisipasi sebagai ruang publik ala Habermas di mana para siswa terlibat dalam diskusi dan pengambilan



keputusan secara kolektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Septiana, 2023) di SMP Islam Fathia Sukabumi dapat menunjukkan cara penerapan demokrasi melalui pelajaran PKn, namun tetap fokus pada aspek pengajaran di dalam kelas dan belum mempertimbangkan bagaimana interaksi sosial di luar kelas seperti aktivitas ekstrakurikuler dan budaya sekolah berpartisipasi dalam membentuk warga negara yang demokratis. rekonstruksi kurikulum keagamaan di daerah pedesaan terbukti memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengadopsi muatan *civic virtue* tanpa kehilangan karakter dasarnya (Hanif, 2014). Salah satu kelemahan utama dalam sastra yang ada adalah kurangnya analisis mengenai bagaimana sekolah Islam yang memiliki nilai-nilai keislaman yang khas seperti ukhuwah, ta'dzim, dan adab bisa menjadi ruang publik yang efektif untuk menghubungkan perbedaan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keagamaan, serta bagaimana hubungan keduanya bisa membentuk beragam karakter warga negara yang istimewa: yang sekaligus demokratis

Penelitian ini berupaya menjawab kekurangan yang ada dalam literatur sebelumnya dengan melakukan observasi langsung yang menyeluruh di MTs N 1 Banyumas untuk meneliti fungsi madrasah sebagai tempat umum dalam menciptakan warga negara yang memiliki sifat demokratis dan religius. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain kasus tunggal dan memiliki tiga tujuan khusus, yaitu: (1) mengenali dan menganalisis bagaimana pembelajaran PPKn serta kegiatan partisipatif Pemilos di MTs N 1 Banyumas berperan sebagai ruang publik yang membantu siswa mengembangkan kompetensi demokratis, termasuk dalam hal partisipasi aktif, negosiasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara bersama. (2) menyelidiki cara-cara mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan Islam dalam praktik sehari-hari di madrasah, termasuk bagaimana madrasah mengelola potensi konflik antara hak untuk berbicara dan

etika berkomunikasi dalam pandangan Islam. (3) menganalisis unsur-unsur yang mendukung dan yang menghambat efektivitas madrasah sebagai ruang publik dalam membentuk warga negara yang memiliki sifat demokratis dan religius, serta merumuskan model pendidikan kewarganegaraan yang holistik dan dapat diterapkan di MTs atau SMP Islam yang lain.

Hipotesis/argumen utama yang diuji dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan madrasah dalam membentuk warga negara yang demokratis dan religius tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran PPKn di kelas atau intensitas kegiatan keagamaan semata, tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana madrasah mampu mengembangkan ruang publik (*public sphere*) yang inklusif, partisipatif, dan deliberative di mana siswa tidak hanya diajari tentang demokrasi secara teori, tetapi secara langsung mempraktikkan nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, menghormati perbedaan, dan menerima keputusan bersama melalui Pemilos sambil tetap mempertahankan dan menghormati nilai-nilai keislaman seperti ukhuwah, ta'dzim, dan adab dalam berkomunikasi. Tanpa ruang publik yang hidup dan berfungsi, pembelajaran demokrasi akan berlangsung secara prosedural dan artifisial. Sebaliknya, ruang publik yang kuat akan menghasilkan internalisasi nilai-nilai demokrasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Habermas, 1989) (Qadir, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat komparatif internal dan eksploratori, yang dipilih karena memberikan kesempatan untuk menyelidiki secara mendalam fenomena masa kini yaitu peran madrasah sebagai ruang publik dalam situasi nyata, serta untuk menganalisis interaksi antar komponen di dalam madrasah. Data primer dikumpulkan secara langsung dari



lapangan melalui tiga metode utama: (1) wawancara mendalam dengan narasumber (2) observasi partisipan di area madrasah untuk menangkap praktik demokrasi dan proses pembelajaran secara alami. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen madrasah seperti modul pembelajaran PPKn, panduan prosedur pemilu di madrasah, peraturan siswa, jurnal kegiatan P5-PPRA, serta dokumentasi.

Teknik pengumpulan informasi memastikan yang diterapkan menggabungkan pendekatan yang terjaga untuk keabsahan Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan waktu berlangsung antara 30 hingga 40 menit untuk setiap informan menggunakan panduan wawancara yang berlandaskan kerangka konsep tentang ruang publik, kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip etika Islam Kedua, observasi partisipan dilakukan sepanjang satu siklus tahapan Pemilu serta proses pembelajaran PPKn di kelas, dengan perhatian khusus pada bagaimana siswa menyampaikan pendapat, interaksi dalam debat pemilu OSIM, presentasi pada asas langsung dan adil, serta pelaksanaan proyek P5-PPRA dengan tema Suara Demokrasi (AlAzhar, 2025). Pengumpulan data dokumentasi dilakukan untuk mengakses artefak tertulis seperti rencana kurikulum madrasah, peraturan Pemilu, ringkasan hasil pemungutan suara, dan instrumen penilaian untuk mata pelajaran PPKn.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan (Saldana J, Huberman, A. M., Miles, 2014), yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan kesimpulan serta verifikasi.

Proses kondensasi dilakukan dengan mengelompokkan, memilih, dan memfokuskan data mentah dari lapangan ke dalam tema utama: pelaksanaan PPKn, proses Pemilu di madrasah, pembangunan karakter kewarganegaraan dan penerapan nilai-nilai Islami. Penyajian data

dirumuskan dalam teks naratif yang terstruktur, diagram alur proses musyawarah madrasah, serta matriks yang menunjukkan hubungan antara aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode (dengan membandingkan hasil wawancara guru, dokumen metrik, dan hasil observasi di lapangan), mevalidasi hasil kepada pembina OSIM dan perwakilan siswa, serta mengadakan diskusi berkala dengan para akademisi di bidang sosiologi Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di MTs N 1 Banyumas menunjukkan bahwa pemilihan ketua OSIS/OSIM (Pemilu) adalah kegiatan yang paling efektif sebagai wadah praktik demokrasi. Dalam kegiatan ini, siswa terlibat langsung dalam seluruh proses demokratis dimulai dari pencalonan, kampanye kreatif di lingkungan sekolah, debat terbuka antar kandidat, pemungutan suara secara rahasia dan jujur menggunakan kotak suara layaknya pemilihan umum, hingga pengawasan serta penghitungan suara oleh panitia pemilihan yang terdiri dari siswa. Ini secara jelas mengajarkan nilai partisipasi, sportivitas, tanggung jawab, dan dihargai terhadap perbedaan pendapat. Seperti yang terlihat di sekolah Islam modern lainnya, Pemilu di MTs N 1 Banyumas menjadi tempat belajar yang nyata bagi siswa untuk memahami dan menjalankan proses demokrasi sejak dini. Proses ini diikuti oleh pasangan calon dari kelas tujuh dan delapan, dengan pemaparan visi-misi yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh kepala madrasah, guru, dan seluruh staf.

Temuan terkait Pemilu di madrasah ini dapat diuraikan dalam beberapa unsur utama yang merefleksikan demokrasi yang substansial. Pertama, kampanye dan debat public, para calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi-misi mereka di depan seluruh komunitas akademik, yang melatih kemampuan berbicara di depan umum dan sopan santun dalam



pendapat menghargai lawan. Kedua, pelaksanaan pemilu secara mandiri oleh siswa. Ketiga, tingginya antusiasme dan partisipasi pemilih. Kesadaran akan pentingnya golput tidak akan ditanamkan sejak dini sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Keempat, penerimaan hasil dengan sportif. setelah suara dihitung dan pasangan terpilih ditentukan, kandidat yang kalah menunjukkan sikap lapang dada dan berkomitmen untuk mendukung kepengurusan baru demi kebaikan madrasah (Bukittinggi, 2025). Fenomena ini memperlihatkan keberhasilan transmisi kecakapan hidup (*life skills*) kepemimpinan remaja dalam ekosistem pendidikan Islam di Banyumas (Hanif, 2018).

Konteks pelaksanaan Pemilos sebagai laboratorium demokrasi di MTs N 1 Banyumas didukung oleh kebijakan Kurikulum Merdeka yang memberikan waktu khusus untuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA), terutama pada tema “Suara Demokrasi”. Di madrasah ini, kegiatan Pemilos berhasil diadakan sebagai sarana pembelajaran nyata mengenai praktik demokrasi, yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana siswa belajar tentang tanggung jawab dan pemilihan yang berdasarkan visi, misi, serta integritas (Hidayatullah, n.d.). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada siswa sebagai pemilih pemula sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa. Guru PPKn dan pimpinan madrasah menekankan bahwa simulasi ini sangat penting untuk meredakan sikap apatis siswa terhadap politik, serta menyelaraskan realitas sosial dengan konsep teoritis tentang integrasi Islam-demokrasi yang disusun oleh para ahli (Afendi, 2026).

Nilai demokrasi di MTs N 1 Banyumas tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran PPKn di kelas secara formal, tetapi juga

diwujudkan secara sinergis melalui berbagai kesempatan institusional lainnya yang melibatkan siswa secara langsung. Ini termasuk musyawarah kelas untuk menyusun struktur kepengurusan dan tugas piket, penyusunan peraturan kelas secara partisipatif, kegiatan Pramuka yang mengajarkan kepemimpinan kelompok, serta penugasan berbasis proyek P5-PPRA. Keterpaduan tersebut sejalan dengan proses penanaman nilai-nilai demokrasi di lembaga pendidikan Islam lainnya, di mana kegiatan organisasi dan kepanduan secara sengaja diarahkan untuk melatih siswa untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menghargai sesama, serta bersosialisasi secara inklusif di dalam dan luar sekolah demi membentuk karakter yang kuat. Eksistensi kegiatan ini membuktikan bahwa pemanfaatan Kurikulum Merdeka (P5-PPRA) bertindak sebagai jembatan sosiologis yang efektif untuk mempertemukan agenda kewarganegaraan nasional dengan nilai teologis *Rahmatan lil Alamin* (Asatuti S., Hanif, 2025).

Hubungan antara integrasi kurikulum PPKn dan aktivitas praktis di madrasah dijalankan melalui tiga mekanisme utama yang saling mendukung. Pertama, mekanisme pembelajaran berdasarkan pengalaman; teori hak untuk menyampaikan pendapat yang diajarkan kepada siswa dalam topik Demokrasi Pancasila pada pelajaran PPKn langsung diterapkan saat mereka melakukan musyawarah untuk menentukan program kerja kelas. Kedua, mekanisme dan internalisasi secara bertahap; proses internalisasi nilai berjalan seiring dengan masa pendidikan siswa, di mana siswa kelas VIII menunjukkan kematangan dalam disposisi demokratis yang lebih baik dibandingkan siswa kelas VII karena lebih sering terlibat dalam siklus forum musyawarah madrasah. Ketiga, mekanisme kelembagaan; madrasah memberikan contoh dengan melibatkan perwakilan siswa dalam pertemuan evaluasi tertentu. Proses ini selesai secara terbuka dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan



keadilan, yang menjadi referensi sosiologis yang berharga bagi siswa tentang bagaimana keadilan institusional ditegakkan.

Konteks implementasi nilai-nilai demokrasi melalui berbagai aktivitas institusional di MTs N 1 Banyumas sangat dipengaruhi oleh diagnostik yang diberikan oleh Madrasah Kurikulum Merdeka untuk menyusun pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran PPKn di kelas tidak lagi fokus pada hafalan, melainkan pada studi kasus-kasus yang berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat. Pendekatan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya membangun sikap tanggung jawab siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif (Septiana, 2023). Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan jam pelajaran resmi di kelas, madrasah mengatasi masalah tersebut dengan menjadikan organisasi intra madrasah sebagai sektor utama dalam penguatan karakter kewarganegaraan dan integritas (Sukmawati, 2018). Pelaksanaan Pemilos dan musyawarah yang mengikuti pola pemilu nasional memberikan pengalaman nyata yang berharga bagi siswa madrasah tentang prosedur demokrasi secara formal dan substantif dalam konteks pendidikan.

Salah satu penemuan paling signifikan dari pembelajaran di MTs N 1 Banyumas ini adalah keberhasilannya madrasah dalam menyatukan nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal dengan ajaran Islam, sehingga menciptakan karakter siswa yang religius dan demokratis sekaligus. Hal tersebut terlihat jelas dalam etika komunikasi yang berkembang di madrasah; contohnya, dalam pelaksanaan debat calon Ketua OSIM dilakukan dengan sangat mematuhi norma Islami tidak menjatuhkan satu sama lain secara pribadi, menggunakan bahasa yang sopan, serta menghargai perbedaan pendapat sebagai bentuk kasih sayang. Selain itu, visi dan misi yang disusun oleh kandidat pengurus tidak hanya fokus pada program kemajuan yang

bersifat duniawi atau akademis, tetapi juga menggabungkan program peningkatan akhlak, kebiasaan shalat berjamaah, dan penciptaan suasana madrasah yang Islami, aktif, dan kreatif demi terwujudnya generasi khoiru ummah yang berkontribusi positif.

Strategi sosiologis yang dianut oleh MTs N 1 Banyumas untuk menggabungkan elemen demokrasi dan keislaman yang terdiri dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan normatif-integratif; guru PPKn dan guru PAI bekerja sama untuk menjelaskan bahwa tindakan demokratis seperti menghargai perbedaan pandangan dengan setara dengan penerapan syura dalam tradisi Islam. Kedua, pendekatan prosedural-etis; mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam peraturan Pemilos, seperti larangan kampanye hitam, ghibah, atau menfitnah calon lainnya. Partisipasi dalam pemilihan dianggap sebagai bagian dari usaha untuk membangun kemaslahatan bersama (masalah ammah) dan tanggung jawab kewargaan. Ketiga, pendekatan struktural-partisipatif; membentuk Komisi Pemilihan dengan melibatkan siswa, yang dibimbing oleh pembina madrasah yang bertindak sebagai fasilitator etika tanpa memonopoli hak suara siswa, sehingga musyawarah tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan masalah.

Nilai dan peluang penting yang dihasilkan dari penemuan ini sangat strategis untuk pengembangan kurikulum sekolah di Indonesia di masa depan. Realitas ini menunjukkan secara empiris bahwa madrasah tidak perlu terjebak dalam pilihan antara menjadi lembaga yang terasing demi ritual kesalehan atau lembaga sekuler demi mencapai kemampuan global-demokratis. Keduanya dapat menyatu secara produktif karena prinsip-prinsip mulia Islam sangat terkait dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Peluang ini memperkuat ide tentang perlunya revitalisasi ruang publik yang bernuansa religius sebagai pusat pengembangan literasi kewarganegaraan yang beradab dan



bermoral. Keberhasilan penggabungan di tingkat tsanawiyah ini memberikan model yang berharga bahwa internalisasi nilai demokrasi yang bersumber dari spiritualitas keagamaan dapat menghasilkan loyalitas kewarganegaraan yang lebih tulus dan kuat dalam keberagaman bangsa.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa madrasah telah berhasil bertransformasi menjadi arena publik yang bersifat inklusif, partisipatif, dan deliberatif untuk para siswa. Dengan menggunakan alat praktik seperti Pemilihan Ketua OSIS/OSIM (Pemilos) yang dikombinasikan dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA) dengan tema "Suara Demokrasi", lembaga ini berhasil mengubah pemahaman tentang demokrasi yang awalnya kaku dan prosedural menjadi praktik demokrasi yang lebih substantif dan dinamis. Penerapan nilai-nilai kewargaan ini berjalan beriringan melalui jembatan kurikulum PPKn yang bersifat teoritis dan budaya organisasi yang memiliki ciri khas tradisi keislaman. Yang paling penting, madrasah berhasil menanggalkan dikotomi antara kesalehan dalam ritual keagamaan dan keterampilan global-demokratis, di mana nilai-nilai demokrasi universal (seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan sportivitas) dapat bersatu secara harmonis dengan nilai-nilai moral Islam (ukhuwah Islamiyah, ta'dzim, dan etika berbicara), sehingga menciptakan sebuah konstruksi sosiologis yang baru berupa karakter siswa sebagai individu yang religius dan sekaligus demokratis.

Saran

Bagi para pendidik dan pengelola madrasah, disarankan untuk selalu berupaya menjaga serta memperbanyak ruang kebebasan bagi organisasi siswa (seperti Komisi Pemilihan

OSIM) dan mengurangi campur tangan yang bersifat mengarahkan dari guru. Hal ini dilakukan agar tradisi diskusi siswa di ruang publik sekolah bisa berkembang secara alami, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk kebijakan pengembang, Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama dianjurkan untuk mengadopsi model integrasi budaya sosiologis yang diterapkan di MTsN 1 Banyumas sebagai acuan standar dalam menguraikan panduan praktis pelaksanaan P5-PPRA di tingkat nasional, sehingga nilai Rahmatan lil Alamin dapat terwujud dalam praktik sosiopolitik bagi para pemilih pemula. Terakhir, bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian dengan melakukan studi longitudinal atau komparatif dalam skala besar untuk menguji konsistensi serta ketahanan karakter keagamaan-demokratis ini ketika para siswa sudah menyelesaikan pendidikan dan berinteraksi langsung di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, A. R. (2026). *Dari masjid ke ruang publik: Revitalisasi peran umat dalam demokrasi substantif*. UINSI Samarinda. <https://www.uinsi.ac.id/2026/03/01/dari-masjid-ke-ruang-publik-revitalisasi-peran-umat-dalam-demokrasi-substantif/>
- AlAzhar, W. (2025). *PEMILOS, laboratorium demokrasi di SMP Islam Al Azhar 38 Wonosari*. <https://ayws.sch.id/pemilos-laboratorium-demokrasi-di-smp-islam-al-azhar-38-wonosari/>
- Asatuti S., Hanif, M. (2025). Analisis implementasi P5-PPRA: Menjembatani kurikulum nasional dan nilai Rahmatan Lil Alamin di madrasah tsanawiyah. *Kurikulum Dan Pembelajaran UIN Saizu*, 1(13), 89–104.
- Bukittinggi, A. A. 45. (2025). *Suara Demokrasi, Tunas Bangsa: SMP Islam Al Azhar 45 Bukittinggi laksanakan pemilos*. <https://smp.alazhar45.sch.id/index.php/beri>



ta/zona-siswa/115-team

- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Hanif, M. (2014). Rekonstruksi kurikulum pendidikan agama Islam berbasis muatan lokal di madrasah pedesaan. *Kependidikan Islam UIN Saizu*, 2(1), 45–63.
- Hanif, M. (2018). Penanaman nilai-nilai kepemimpinan dan kecakapan hidup (life skills) melalui organisasi siswa intra madrasah. *Penelitian Pendidikan Islam*, 2(13), 178–195.
- Hanif, M. (2021). Kontra-radikalisme digital di kalangan remaja: Internalisasi nilai sosiologis keagamaan di Kabupaten Banyumas. *Sosiologi Agama*, 1(15), 89–106.
- Hidayatullah, S. I. (n.d.). *Pemilos SMP Islam Hidayatullah: Miniatur demokrasi dan pembelajaran karakter*. SMP Islam Hidayatullah. 2025.
<https://smpislamhidayatullah.sch.id/2025/11/03/pemilos-smp-islam-hidayatullah-miniatur-demokrasi-dan-pembelajaran-karakter/>
- Musthofiyah. (2012). Pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif pendidikan karakter. *Studi Kasus SMP Islam Sudirman Tenganan Kabupaten Semarang*, 57.
- Qadir, Z. (2021). *Moderasi beragama: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Raihani. (2007). Education reforms in Indonesia in the twenty-first century. *International Education Journal*, 8(1), 172–183.
- Saldana J, Huberman, A. M., Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Septiana, T. (2023). Implementasi pendidikan demokrasu melalui pembelajaran PKn untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab (Studi Kasus eksplanatoris di SMP Islam Fathia Kota Sukabumi). *Jurnal Rontal Keilmuwan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1. <https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/5483/0>
- Sukmawati. (2018). *Implementasi penguatan pendidikan karakter integritas dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Studi kasus SMP Islam Athirah Makassar*. Pendidikan Indonesia.